

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang pesat, persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat. Seiring dengan perkembangan ini, perusahaan menghadapi tuntutan yang signifikan, termasuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan di luar manajemen dan pemilik modal. Tanggung jawab ini tercermin dalam penerapan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan atau laporan berkelanjutan, serta melalui keterlibatan dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan. Misi jangka panjang perusahaan adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga diharapkan memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya (Khafid, 2018). John Elkington (1994), pendiri perusahaan konsultan *Sustainability* dan penulis buku *Cannibal with Forks*, telah berperan penting dalam membantu bisnis mengintegrasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep awal memaksimalkan laba kemudian berkembang menjadi *konsep triple bottom line* atau 3P (*profit, people, planet*) (Madona & Khafid, 2020).

Laporan Keberlanjutan merupakan bentuk pelaporan informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan yang mengintegrasikan aspek pelaporan sosial, pelaporan lingkungan, dan pelaporan tata kelola korporasi dalam satu dokumen (Manase *et al.*, 2022). Untuk menunjukkan

komitmennya terhadap masalah lingkungan, ekonomi, dan sosial, perusahaan mengeluarkan laporan keberlanjutan. Dengan itu dapat meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan serta membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di luar perusahaan. Jika reputasi perusahaan baik, maka perusahaan akan memperoleh legitimasi dari masyarakat, yang akan sangat membantu keberlanjutan perusahaan. Adanya regulasi yang menuntut perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi pendorong bagi manajer perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan atau *sustainability report*.

Berkelanjutan merupakan perkembangan yang menemukan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang modalnya dimiliki sebagian besar atau sepenuhnya oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang diasingkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan untuk BUMN. Sudah jelas bahwa pajak yang dipungut oleh rakyat Indonesia adalah sumber utama kekayaan negara ini. Dengan demikian, menjadi krusial bagi para pemangku kepentingan, terutama masyarakat, untuk memahami sejauh mana tanggung jawab BUMN dalam mengelola modal yang diberikan oleh negara. Selain itu, penting juga untuk menilai seberapa besar kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan menjamin kualitas hidup generasi mendatang.

Untuk memahami hal ini lebih lanjut, BUMN diharapkan menyusun laporan keberlanjutan atau *sustainability report* yang memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya dan dampaknya terhadap aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi (Hikmah & Anisykurlillah, 2023).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* antara lain ialah kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan *good corporate governance*. Informasi mengenai kinerja keuangan salah satunya profitabilitas yaitu untuk menilai perekonomian di masa depan (Hardi, 2023). Menurut teori *stakeholders*, profitabilitas tinggi dapat menunjukkan laba yang tinggi, kinerja keuangan yang baik, dan kepercayaan yang tinggi (Yunan *et al.*, 2021). Kepercayaan yang tinggi dari pihak pemangku kepentingan memungkinkan perusahaan untuk mengumumkan kinerjanya melalui pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan dengan *leverage* tinggi berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari para *stakeholders*, termasuk kreditur, dengan membuat *sustainability report*. *Sustainability report* dapat mengalihkan perhatian dari *leverage* yang tinggi. Pengungkapan laporan keberlanjutan dapat mempertahankan dukungan dan kepercayaan kreditur (Hikmah & Anisykurlillah, 2023).

Ukuran suatu perusahaan dijelaskan sebagai indikator untuk menilai besarnya atau kecilnya perusahaan (Agustina, 2020). Dalam perbandingan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar cenderung memberikan lebih banyak informasi dalam *sustainability report*. Hal ini dikarenakan oleh tujuan perusahaan besar untuk memastikan kelangsungan usaha dengan

meningkatkan citra perusahaan. Dengan menunjukkan kinerja yang baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam laporan keberlanjutan, perusahaan berupaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingannya. (Khafid, 2018).

Tobing *et al.*, (2019) menyatakan bahwa karena adanya tuntutan kepada perusahaan untuk menyajikan informasi secara transparan, menjadi organisasi yang akuntabel, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan kini diharapkan memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang kegiatan sosialnya. Dampak dari menerapkan prinsip-prinsip GCG adalah bahwa perusahaan tidak dapat hanya fokus pada kinerja keuangan semata, tetapi juga perlu mengevaluasi kinerja sosial dan lingkungan. Penerapan *corporate governance* akan dilihat dengan mekanismenya yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, rapat dewan direksi, dan rapat komite audit.

Faktor yang pertama ialah dewan komisaris independen, semakin banyak komisaris independen dalam dewan komisaris, semakin adil dewan komisaris dalam mengambil keputusan untuk melindungi seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, keberadaan komisaris independen sebagai bagian dari manajemen perusahaan yang baik akan mendorong penerbitan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif dan transparan.

Faktor yang kedua ialah dewan direksi, pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para pemegang saham adalah dewan direksi, juga dikenal sebagai *board of directors*. Salah satu cara dewan direksi mewujudkan *good*

*corporate governance* adalah dengan melaksanakan tugas pengawasan atas aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, *sustainability report* adalah bukti bahwa suatu perusahaan telah mewujudkan *good corporate governance*.

Faktor ketiga yaitu komite audit juga berperan penting sebab semakin sering pertemuan komite audit diadakan, lebih banyak pengawasan yang dilakukan dan lebih banyak pengungkapan tentang laporan keberlanjutan. Dengan seringnya komite audit mengadakan pertemuan, anggota komite akan lebih aktif dalam pertukaran gagasan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang keputusan yang akan diambil, termasuk keputusan terkait pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, sehingga keputusan yang diambil dapat mencakup perspektif yang luas dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. (Hikmah & Anisykurlillah, 2023).

Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan telah menjadi perhatian yang signifikan karena perannya yang sangat penting terhadap lingkungan. Dalam beberapa waktu terakhir, laporan keberlanjutan telah menjadi fokus utama bagi perusahaan, menunjukkan bahwa tujuan mereka tidak hanya sebatas mencapai keuntungan finansial semata. Konsep ini timbul sebagai respons terhadap tuntutan dan harapan masyarakat akan peran perusahaan dalam komunitas. Laporan keberlanjutan merupakan inisiatif sukarela yang bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Keberadaan *sustainability report* sangatlah vital karena memungkinkan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memahami perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Terdapat regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta manajer perusahaan diminta untuk mengeluarkan *sustainability report*. (Tobing *et al.*, 2019).

Pengamatan terhadap perkembangan pengungkapan keberlanjutan di lima negara ASEAN menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi terakhir dengan tingkat pengungkapan sebesar 53,6%. Menurut laporan dari majalah *csr.com*, hanya 30% dari 100 perusahaan teratas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah menerbitkan laporan berkelanjutan (SR). Pada tahun 2017, hanya 49 perusahaan yang terdaftar di BEI yang telah menyajikan laporan berkelanjutan (SR) (Alfaiz & Aryati, 2019). Rendahnya pengungkapan *sustainability report* di Indonesia karena tidak ada *single definition* yang diterima secara global untuk laporan keberlanjutan, tidak ada format yang jelas untuk laporan keberlanjutan dan perusahaan tidak mau terbuka dalam menjalankan bisnisnya dan tidak sepenuhnya berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang memiliki *good corporate governance* menjadi alasan utama perusahaan tidak melakukan pengungkapan. Alasan lainnya adalah bahwa manajer perusahaan memiliki banyak opsi untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan dan penyusunan laporan keberlanjutan dianggap memerlukan biaya yang banyak (Tobing *et al.*, 2019).

Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengawasi kegiatan bisnis saat ini dan bagaimana keberlanjutan bisnis tersebut memengaruhi lingkungan (Alfaiz & Aryati, 2019). Dilansir dari [www.eljabar.com](http://www.eljabar.com) (2022) FK31 menyampaikan bahwa PT Semen Indonesia masih belum memenuhi kewajiban penggantian hutan, akibat perusakan hutan yang telah dilakukan. PT. Aneka Tambang Tbk (ANTAM) mencemari sungai dan pantai di Halmahera Timur, menyebabkan ekosistem mangrove dan laut terancam rusak serta warga kehilangan sumber air bersih (Mongabay.co.id, 2021). Tidak hanya itu akhir-akhir ini, Kalimantan Tengah mengalami tragedi sosial dan lingkungan. Bisnis PT Binasawit Abadi Pratama dan PT Smart Tbk mencemari limbah yang dihasilkan dari pengolahan sawit di Danau Sembuluh, Kalteng. Akibatnya, enam desa yang bergantung pada perikanan di danau tersebut hampir berhenti menjalani kehidupan mereka (Alfaiz & Aryati, 2019).

Dengan adanya kasus-kasus tersebut, perusahaan telah melakukan pelanggaran sosial dan harus segera diselesaikan. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan berdampak negatif pada reputasi perusahaan di mata masyarakat, terutama oleh para pemegang saham. Banyaknya desakan dari berbagai pihak membuat perusahaan bertanggung jawab atas dampak bisnisnya terhadap masyarakat dengan mengungkapkan *sustainability report*. Selain memperhatikan kepentingan kelompok pemegang saham dan *kreditur*, perusahaan diminta untuk bertanggung jawab terhadap pihak yang

lebih luas (Alfaiz & Aryati, 2019). Para *stakeholder* dan calon investor mulai memperhatikan *sustainability report*. Investor tidak lagi hanya bergantung pada neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk membuat keputusan investasi. *Sustainability report* menggambarkan secara menyeluruh hasil pengembangan keberlanjutan perusahaan yang merupakan keseimbangan antara *people* (sosial), *planet* (lingkungan) dan profit (ekonomi) dan dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) (Alfaiz & Aryati, 2019).

Dalam ajaran Islam, Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menjaga dan mengatur sumber daya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu kelangsungan hidup makhluk lain. Setiap individu diwajibkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, menghindari perbuatan yang dapat merusak bumi. Dalam Al-Qur'an memberikan arahan mengenai tugas manusia dalam merawat alam, mengingat bahwa manusia dan alam adalah hasil ciptaan Allah SWT. Seperti yang tercantum dalam firman Allah dalam Al-Qur'an pada Surah As-Syu'ara (26): 151-152.

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (١٥١)

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٥٢)

Artinya:

“Dan janganlah kamu mengikuti orang yang melewati batas. Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.”



Ayat tersebut menegaskan larangan merusak bumi, sehingga upaya pelestarian lingkungan seharusnya menjadi bagian integral dari kehidupan umat muslim, bukan hanya sebatas konsep. Manusia memiliki tanggung jawab terhadap alam semesta, termasuk dalam kegiatan pertanggungjawaban lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ayat (1) yang menyatakan bahwa kesadaran terkait aktivitas akuntabilitas lingkungan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam.

Dalam perkembangan teori *stakeholder*, perusahaan harus bermanfaat bagi pemangku kepentingan bukan hanya untuk kepentingannya sendiri. Menurut Alfaiz & Aryati (2019) teori *stakeholder* dalam suatu perusahaan tidak hanya seharusnya memprioritaskan kepentingan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga harus memperhatikan karyawan, konsumen, dan masyarakat. Ini disebabkan oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang melampaui kepentingan manajemen dan pemegang saham. Menurut teori legitimasi, perusahaan selalu meyakini bahwa operasinya mematuhi standar masyarakat. Jika operasi mereka tidak memenuhi standar tersebut, perusahaan akan menghadapi masalah legitimasi karena tidak memenuhi harapan masyarakat. Dalam konteks ini, pengungkapan laporan keberlanjutan dapat membantu menyeimbangkan perbedaan antara operasi perusahaan dan harapan masyarakat.

Penelitian ini juga didasarkan pada *research gap*, yaitu inkonsistenan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Lucia

& Panggabean (2018) dan Wahjuni Latifah *et al.*, (2019) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bhatia & Tuli (2017) dan Sinaga & Fachrurrozie (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, Ariyani *et al.* (2018) menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Pramudiati (2019) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun sebaliknya, Penelitian yang dilakukan oleh Meutia *et al.*,(2019) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tobing *et al.*,(2019) dan Sulistyawati & Qadriatin (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Arumsari, (2019) dan Hidayah *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Di sisi lain, temuan dari Ariyani *et al.*,(2018) dan Agustina (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian Agustina (2020), Dewi & Ramantha (2021) dan Hidayah *et al.*, (2019) menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian Ardiani *et al.*, (2022) dan Madona & Khafid (2020) menunjukkan hasil yaitu komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitian Sulistyawati & Qadriatin (2019) juga menemukan hasil yang sama bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keberlanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ramantha (2021) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh positif pada laporan keberlanjutan. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Sulistyawati & Qadriatin (2019) dan Madona & Khafid (2020) menunjukkan adanya pengaruh negatif komisaris independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Sedangkan, Tobing *et al.*,(2019) dan Sinaga & Fachrurrozie (2017) menemukan hasil yang beda yaitu komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian Sinaga & Fachrurrozie (2017) dan Latifah *et al.*, (2019) menemukan bahwa dewan direksi berdampak positif pada laporan keberlanjutan. Sebaliknya, Lucia & Panggabean (2018) menemukan bahwa dewan direksi berdampak negatif pada laporan keberlanjutan. Studi sebelumnya, Agustina (2020) menemukan bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Tobing *et al.*, (2019) dengan menambahkan dimensi pada variabel *good corporate governance* dengan dewan direksi sebagai variabel independen dan mengubah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN periode tahun 2020-2022 yang sudah menerbitkan *sustainability report* dan pada penelitian ini menggunakan GRI 2013 untuk mengukur pengungkapan *sustainability report*.

Penelitian mengenai *sustainability report* di Indonesia masih memiliki daya tarik untuk dikaji lebih mendalam. Fakta ini mencerminkan perlunya penelitian tambahan guna memahami secara lebih baik mengenai manfaat, keuntungan, dan aspek lain yang terkait dengan pengungkapan *sustainability report* yang belum mencapai tingkat optimal. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul **“PENGARUH KINERJA KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *SUSTAINABILITY REPORT*”**.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan yang diukur melalui profitabilitas dan *leverage*, variabel ukuran perusahaan, serta variabel *good corporate governance* yang diukur melalui keberadaan dewan komisaris independen, komite audit dan dewan direksi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
5. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?
6. Apakah dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini menguji dan memberikan bukti empiris apakah:

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*
2. *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *sustainability report*

3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*
4. Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*
5. Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*
6. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian harapannya ini akan menyediakan informasi mengenai signifikansi dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh melalui pengungkapan *sustainability report* bagi perusahaan. Informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan pengetahuan di bidang tersebut. Selain itu, diharapkan juga dapat berfungsi sebagai referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang memberikan pengetahuan dan informasi yang berguna dalam pembuatan kebijakan terkait pengungkapan *sustainability report*. Harapannya

adalah kebijakan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan.

- b.** Untuk para calon investor, penelitian ini bisa menjadi acuan karena menyajikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Ini membantu para calon investor untuk mengevaluasi perusahaan mana yang menunjukkan kinerja keuangan dan pertumbuhan yang lebih baik dalam jangka panjang.